

# Shared Resources Joint Solutions

## Sawit Watch - Padi Indonesia



### SHARED RESOURCES JOINT SOLUTIONS PROGRAM

SRJS merupakan gagasan yang dibangun bersama oleh Sawit Watch, Yayasan PADI Indonesia dan didukung oleh IUCN Belanda.

Gagasan ini diharapkan bisa membangun persepsi bersama tentang suatu isu di dalam bentang alam tertentu, kemudian saling mengidentifikasi sumber daya yang dimiliki dan saling berbagi untuk mencari atau menjalankan solusi bersama. Solusi bersama dalam upaya mengatasi permasalahan dan tantangan kedepan.

Secara program mengedepankan tiga hal yaitu Ketahanan Iklim, Ketersediaan Air dan Kedaulatan Pangan. Kondisi iklim erat dikaitkan dengan potensi bencana dan memberikan dampak turunan terhadap layanan ekologi, ketersediaan air dan pangan.

Program di Indonesia berjalan di tiga lanskap yaitu Aceh, Papua dan Kalimantan Utara. Di Kalimantan Utara program ini difokuskan di Bulungan.

### SRJS di Kabupaten Bulungan

Program dengan pendekatan bentang alam ini memilih **Daerah Aliran Sungai Kayan** dengan titik intervensi di **Delta Kayan**.

Delta Kayan merupakan hilir dari aliran DAS Kayan, area tersebut memiliki tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bulungan. Maka kawasan ini termasuk rentan terhadap dampak dari pengelolaan sepanjang DAS Kayan. Kerentanan yang dapat dirasakan di kawasan Delta Kayan diantaranya terbatasnya air bersih, ketersediaan pangan, bencana alam serta perubahan iklim



## Apa yang sudah dilakukan

Mei- Desember 2016 merupakan fase awal terdiri dari

### KAJIAN IPG'S

International Public Good's (IPG's), secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu benda yang menjadi milik publik. Benda tersebut bisa berupa bentang alam yang memiliki arti penting atau memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat banyak. Baik itu masyarakat sekitar maupun dari tempat lain atau belahan dunia lainnya.

Kajian yang kami lakukan di Kabupaten Bulungan mencoba mengidentifikasi apa dan dimanakan serta tingkat keterancaman IPG's bagi masyarakat Bulungan maupun masyarakat dunia. Kajian dibangun dengan pengolahan data kewilayah, sosial dan ekonomi. Data yang diolah berasal dari data skunder dan data primer dari berbagai sumber termasuk dari pemerintah kabupaten Bulungan.

### PRODUK KEBIJAKAN

Kajian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan daerah kabupaten, provinsi serta kebijakan lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap kabupaten Bulungan.

Beberapa kebijakan penting yang dilihat seperti Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan, RTRWP Kalimantan Utara, RTRWK Kabupaten Bulungan, Rencana Pembangun dan beberapa kebijakan lainnya. Salah satu kebijakan yang menarik dilihat seperti rencana pembangunan energi dan kawasan pangan.

### KAJIAN ARAH DAN RENCANA PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BULUNGAN

Kabupaten Bulungan sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Utara terus bertumbuh. Arus modal dalam upaya mempercepat pembangunan dilakukan pemerintah kabupaten dan didukung oleh pemerintah provinsi. Kegiatan investasi berupa sektor pertambangan, agrobisnis, kehutanan, infrastruktur dan energi terus bertumbuh.

Kegiatan investasi tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun pembangunan pada sektor diatas perlu ada yang kontrol dan sesuai dengan daya dukung lingkungan dan sosial yang ada di Kabupaten Bulungan. Kajian tersebut diharapkan memberikan masukan terhadap pengambilan kebijakan agar unsur-unsur itu bisa



### GENDER DAN INKLUSIVITAS

Kajian ini untuk mengidentifikasi masyarakat rentan yang ada di Bulungan yang terkait dengan pembangunan dan kebijakan. Perempuan dari berbagai kelompok sosial mempunyai peran dalam berbagai aspek terkait pengelolaan sumberdaya alam mulai dari aspek tenurial lahan (land tenure), tata kuasa lahan dan sumberdaya alam, tata kelola lahan dan sumberdaya alam, pengetahuan pengelolaan sumberdaya alam, tata produksi, tata perdagangan, dan lain sebagainya. Selain perempuan, terdapat berbagai kelompok marjinal lain, termasuk di dalamnya kaum difabel/disabilitas, yang kehidupannya juga bergantung pada pengelolaan sumberdaya alam.

## DIALOG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN, MASYARAKAT, AKADEMISI DAN ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL

Dilakukan untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan isu penting, permasalahan maupun harapan terhadap kawasan bentang alam yang dikaji

Program ini bertujuan :

### “Keberlanjutan layanan Ekologis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bulungan”

Indikator yang dilihat seperti Bencana Ekologis, perubahan iklim, sumber penghidupan masyarakat (terutama pangan) dan air bersih

### Siapa Kelompok Sasaran Program

Program ini ditujukan untuk;



### MASYARAKAT YANG BERADA DI DAS DAN DELTA KAYAN

dengan beberapa usulan program antara lain :

- ▶ Penguatan kapasitas masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam dengan memfasilitasi kegiatan pemetaan partisipatif batas desa, identifikasi potensi, penyusunan perencanaan tata guna lahan, penyusunan untuk memperluas akses terhadap sumber daya alam
- ▶ Penguatan kapasitas masyarakat dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa
- ▶ Penguatan masyarakat dalam peningkatan peran perempuan dan kaum marginal dalam pembangunan di tingkat desa
- ▶ Memfasilitasi penguatan sumber-sumber penghidupan masyarakat
- ▶ Penguatan kapasitas masyarakat agar mampu berpartisipasi dalam kebijakan publik
- ▶ Penguatan posisi masyarakat dalam bekerja sama dengan investor maupun usaha yang masuk kewilayah mereka

## PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN DAN PROVINSI BULUNGAN TERUTAMA UNTUK SEKTOR PERTANIAN, PERKEBUNAN, KEHUTANAN, PERENCANAAN DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT YANG BERADA DI DAS DAN DELTA KAYAN

dengan beberapa usulan program antara lain :

- ▶ Memberikan dukungan dalam penyusunan kebijakan penataan ruang yang lebih baik dan lebih partisipatif
- ▶ Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan yang lebih memperhatikan kondisi lingkungan hidup dan resiko bencana, seperti dukungan dalam penyusunan KLHS terutama untuk kebijakan strategis di kabupaten Bulungan
- ▶ Memberikan dukungan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan agar menjadi lebih baik, lebih kuat dan dalam penyusunannya bisa menjadi lebih partisipatif



## INDUSTRI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DAN PANGAN

dengan beberapa usulan program antara lain :

Sawit Watch mencoba mendorong perusahaan perkebunan kelapa sawit agar menerapkan Prinsip dan Kriteria Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan. Pada program ini, Sawit Watch berupaya mendorong ada kebijakan dan inisiatif baik perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Bulungan dapat menjalankan prinsip berkeadilan, keberlanjutan layanan lingkungan dan tanpa resiko konflik sosial.

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan untuk memenuhi asas dan kebutuhan akan kedaulatan pangan yang berbasis petani.



## SAWIT WATCH

**Sawit Watch** adalah sebuah organisasi non pemerintah di Indonesia berbasis keanggotaan individu yang prihatin terhadap dampak-dampak negatif sistem perkebunan besar kelapa sawit. Sejak 1998, Sawit Watch telah terhubung lebih dari 50 mitra lokal yang menangani langsung lebih dari 40.000 kepala keluarga terkena dampak perkebunan kelapa sawit diseluruh Indonesia. Sampai dengan tahun 2016 anggota Sawit Watch berjumlah 139 orang. Anggota-anggota tersebut tersebar utamanya di Indonesia terdiri dari pekebun, buruh kebun, masyarakat adat, aktivis ornop, wakil rakyat, guru, dan pengajar di perguruan tinggi.



**Visi Sawit Watch** adalah terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam melalui perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan serta penguasaan sumberdaya alam secara adil dan lestari. **Misi Sawit Watch** adalah mendorong meningkatnya posisi tawar petani dalam pembangunan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Mendorong penyelesaian konflik-konflik perkebunan kelapa sawit di Indonesia, serta mendorong terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

**Kegiatan yang dilakukan oleh Sawit Watch bersama dengan pemerintah** diantaranya mendorong kebijakan dalam PERDA di **Kalimantan Tengah (kabupaten Pulang Pisau)** tentang Perlindungan Lahan Pangan Berkelanjutan, Bekerjasama dengan **Pemerintah Kabupaten Berau dalam menyusun KLHS**, mendorong kebijakan tentang Perkebunan Berkelanjutan di Sulawesi Tengah bekerjasama dengan **DPRD Provinsi Sulawesi Tengah** dan mendorong kebijakan tentang **Perlindungan Lahan Gambut di Kabupaten OKI, Sumatera Selatan**.

## PADI INDONESIA



**Padi Indonesia** adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki kepedulian dan perhatian terhadap proses pembangunan (pertanian, kehutanan, perikanan dan perkebunan) yang berdasar pada prinsip - prinsip kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. PADI Indonesia sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah-tengah masyarakat, tidak bergerak di bidang politik dan tidak mencari keuntungan (nirlaba). PADI Indonesia didirikan terhitung sejak bulan Juni 1996, dan telah memiliki catatan Badan Hukum No.1, Tgl. 03 Oktober 1998.

PADI Indonesia didirikan untuk **memfasilitasi, mendampingi dan menjembatani masyarakat** dalam partisipasinya terhadap proses pembangunan (pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan, energy terbarukan) yang berdasarkan kearifan masyarakat setempat (lokal) dilandasi nilai - nilai sosial, budaya, ekonomi masyarakat dan berperan aktif dalam proses pengembangan demokratisasi serta menghargai nilai Hak - Hak Asasi Manusia. PADI Indonesia Lembaga yang tumbuh dan berkembang di tengah - tengah masyarakat tanpa membedakan suku, agama dan golongan.

**Tujuan** secara umum PADI Indonesia adalah turut **berpartisipasi terhadap proses pembangunan pertanian, kehutanan, pesisir dan kelautan (biodiversity) yang mengacu pada keadilan sosial, peningkatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup**.